



Implementasi Pancasila dalam Resolusi Konflik Global : Studi Kasus Peran Indonesia dalam Mediasi Internasional

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Abdurrahman Hadi³, Livia Istiqomah⁴, Jenny Saharany Aulia Putri⁵, Muhammad Asro Al Munawir⁶

¹ Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

² Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

^{3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², abdurrahmanhadi130@gmail.com³, liviara1@gmail.com⁴, jennysaharany06@gmail.com⁵, muhhammadmunawir915@gmail.com⁶

Korespondensi penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract: Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, embodies universal values that are relevant for resolving global conflicts. Indonesia, as a nation that upholds these values, has played a significant role as a mediator in various international conflicts, employing a diplomatic approach based on the principles of Pancasila. This article aims to examine the application of Pancasila values in Indonesia's diplomacy, focusing on case studies of Indonesia's role in mediating the Palestinian conflict, the Rohingya crisis, and tensions within ASEAN. This research adopts a qualitative approach with a case study methodology, enabling a deep understanding of Indonesia's diplomatic dynamics in the context of these global conflicts. Additionally, the research analyzes official documents, academic journals, and Indonesia's foreign policies to provide a comprehensive picture of the effectiveness of a Pancasila-based approach. The results of the analysis indicate that despite existing geopolitical challenges and the dominance of global power structures, the Pancasila-based approach can serve as an effective model for conflict resolution, emphasizing dialogue, social justice, and humanity as the foundation for solutions. Indonesia's diplomacy, which prioritizes Pancasila values, has proven its relevance in fostering a more just and peaceful world order, while strengthening Indonesia's position as a moral leader in international diplomacy.

Keywords: Conflict Mediation, Indonesian Diplomacy, Pancasila, Qualitative Approach

Abstrak: Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki nilai-nilai universal yang relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian konflik global. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, telah memainkan peran penting sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional, menggunakan pendekatan diplomasi berbasis prinsip-prinsip Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam diplomasi Indonesia, dengan fokus pada studi kasus peran Indonesia dalam mediasi konflik di Palestina, krisis Rohingya, dan ketegangan di ASEAN. Dalam menganalisis penerapan Pancasila, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika diplomasi Indonesia dalam konteks konflik-konflik global tersebut. Selain itu, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta kebijakan luar negeri Indonesia untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pendekatan berbasis Pancasila. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa meskipun tantangan geopolitik dan dominasi kekuasaan global masih ada, pendekatan berbasis Pancasila dapat menjadi model resolusi konflik yang efektif, dengan menekankan pentingnya dialog, keadilan sosial, dan kemanusiaan sebagai dasar penyelesaian. Diplomasi Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila telah membuktikan relevansinya dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan damai, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin moral dalam diplomasi internasional.

Kata Kunci: Mediasi Konflik, Diplomasi Indonesia, Pancasila, Pendekatan Kualitatif

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga memiliki dimensi universal yang memungkinkan penerapannya dalam penyelesaian konflik internasional. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mendukung perdamaian dunia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Komitmen ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat nasionalistik, tetapi juga memiliki daya saing dalam kancah global sebagai kerangka normatif yang inklusif dan berkeadilan (Saputra, 2021: 14).

Pancasila juga memberi Indonesia kesempatan untuk menawarkan pendekatan diplomasi berbasis nilai kepada negara-negara di dunia. Pendekatan ini menjadi semakin penting, terutama dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan adanya ketidaksetaraan dalam hubungan internasional. Diplomasi berbasis nilai seperti yang dimiliki oleh Indonesia menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan adil dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional, berbeda dengan pendekatan diplomasi yang mengedepankan kekuatan militer atau kekuasaan ekonomi.

Dalam praktik diplomasi global, Indonesia tidak hanya menjadi aktor pasif, melainkan aktif berkontribusi sebagai mediator dalam konflik-konflik internasional seperti konflik Palestina, krisis kemanusiaan Rohingya, hingga ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan yang digunakan bukan berbasis kekuatan militer atau tekanan politik, melainkan berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila—terutama musyawarah, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Diplomasi semacam ini merefleksikan model diplomasi berbasis nilai (*value-oriented diplomacy*) yang mulai diadopsi oleh banyak negara berkembang sebagai alternatif atas diplomasi kekuasaan (Wibowo, 2022: 103).

Dalam konteks dunia yang semakin multipolar, diplomasi berbasis nilai menjadi kebutuhan strategis. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki peluang untuk memosisikan dirinya sebagai juru damai dunia dengan menawarkan pendekatan etik yang bersumber dari ideologi nasional. Wahyuni (2022) dalam bukunya *Diplomasi Emansipatoris* mengemukakan bahwa nilai-nilai lokal seperti Pancasila dapat dijadikan pijakan etis bagi negara berkembang untuk menantang dominasi diplomasi global yang cenderung hegemonik. Ia menyatakan bahwa “pendekatan diplomasi yang berakar pada nilai-nilai etik lokal justru menjadi kekuatan moral baru yang dapat mempengaruhi arah kebijakan global yang lebih berkeadilan” (Wahyuni, 2022: 88).

Meskipun demikian, implementasi Pancasila dalam diplomasi tidak lepas dari tantangan. Politik internasional masih didominasi oleh kepentingan kekuasaan dan ekonomi, sehingga pendekatan etik dan nilai seperti Pancasila kerap kali dianggap utopis. Namun, keberhasilan Indonesia dalam berbagai forum internasional menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai tetap relevan dan dapat diterima secara luas.

Melalui tulisan ini, penulis menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peran diplomatik Indonesia sebagai mediator konflik global, dengan studi kasus pada konflik Palestina, Rohingya, dan ASEAN. Di samping itu, tulisan ini menambahkan refleksi kritis mengenai potensi Pancasila sebagai paradigma baru dalam diplomasi global yang tidak hanya netral, tetapi aktif mendorong transformasi tatanan dunia yang lebih adil dan manusiawi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam diplomasi Indonesia sebagai mediator konflik global. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, nilai-nilai, dan strategi diplomasi Indonesia. Studi kasus sangat cocok digunakan dalam penelitian yang ingin memahami fenomena secara intensif dan mendalam dalam konteks yang nyata (Harahap, 2020: 57).

Objek kajian dalam penelitian ini meliputi tiga kasus utama: konflik Palestina, krisis kemanusiaan Rohingya, dan ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan. Ketiga kasus ini dipilih karena memiliki kompleksitas geopolitik, agama, dan isu kemanusiaan yang relevan dengan nilai-nilai universal Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai dokumen resmi, jurnal ilmiah, buku referensi, laporan diplomatik, serta kebijakan luar negeri Indonesia. Studi pustaka dianggap relevan dalam pendekatan kualitatif karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji narasi dan makna secara kontekstual (Kristina, 2021: 89).

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam diplomasi Indonesia, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip teoritis dan konteks internasional yang relevan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, digunakan

teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai literatur dari jurnal nasional, internasional, dan dokumen kebijakan resmi.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh, komprehensif, dan reflektif terhadap efektivitas pendekatan diplomasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam menyelesaikan konflik-konflik global.

3. PEMBAHASAN

Pancasila dalam Resolusi Konflik Global

Pancasila, sebagai dasar negara, tidak hanya relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga memberikan landasan etis dalam menghadapi tantangan internasional, termasuk dalam penyelesaian konflik global. Melalui lima sila dalam Pancasila, Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalankan diplomasi, yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Diplomasi Indonesia cenderung mengutamakan penyelesaian damai melalui dialog, ketimbang penggunaan kekuatan atau tekanan politik.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki lima sila yang masing-masing mengandung nilai-nilai yang relevan dalam penyelesaian konflik:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Menekankan pentingnya nilai spiritual dan moral dalam setiap tindakan, termasuk dalam upaya penyelesaian konflik. Diplomasi berbasis nilai Ketuhanan mengajak negara-negara untuk mendasarkan kebijakan luar negeri mereka pada prinsip keadilan dan kesetaraan, yang menghargai hak-hak setiap individu.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Indonesia, dalam peranannya sebagai mediator, selalu mengedepankan penyelesaian konflik yang tidak mengorbankan hak-hak kemanusiaan.
- c. Persatuan Indonesia: Mendorong semangat persatuan dan kesatuan, yang penting dalam meredakan perpecahan dan konflik. Indonesia dalam diplomasi internasional tidak hanya berfokus pada kepentingan politik atau ekonomi, tetapi juga berusaha untuk menciptakan kesepahaman dan persatuan antarnegara.
- d. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan: Menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan pengambilan keputusan secara kolektif sebagai metode penyelesaian konflik. Indonesia sering kali menggunakan musyawarah untuk mencapai konsensus dalam forum internasional.

- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menggaris bawahi pentingnya keadilan dan pemerataan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam diplomasi internasional, Indonesia mengupayakan penyelesaian konflik yang mengedepankan keadilan sosial, bukan hanya untuk negara tertentu, tetapi untuk seluruh dunia.

Sebagai contoh peran Pancasila di internasional, dalam konflik Palestina, Indonesia secara konsisten mendukung hak-hak rakyat Palestina dan mendorong penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi. Pendekatan ini sejalan dengan nilai universal kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung etika global.

Selain itu, Indonesia juga memainkan peran penting dalam krisis Rohingya, dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerjasama menyelesaikan masalah ini. Pendekatan Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan dialog dan kerjasama regional untuk mencapai solusi yang adil.

Penerapan Pancasila dalam diplomasi Indonesia juga terlihat dalam pendekatan yang digunakan untuk menghadapi ketegangan di Laut Cina Selatan. Indonesia memilih pendekatan yang menekankan dialog dan penyelesaian damai, serta menjaga stabilitas kawasan. Indonesia berperan sebagai mediator yang mengedepankan keseimbangan dan kesetaraan dalam menangani ketegangan internasional.

Para akademisi kontemporer semakin menyadari bahwa diplomasi berbasis nilai Pancasila dapat menjadi kekuatan moral yang signifikan dalam politik internasional. Sebagai contoh, Wibowo (2022) berpendapat bahwa Indonesia telah berhasil memosisikan dirinya sebagai negara yang mampu menawarkan solusi alternatif terhadap diplomasi kekuasaan yang sering kali dominan dalam politik global. Wibowo menekankan bahwa melalui pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah, Indonesia telah membuktikan bahwa diplomasi berbasis nilai bukanlah sebuah utopia, melainkan strategi yang relevan untuk menciptakan perdamaian dunia.

Selain itu, Wahyudi (2021) juga mencatat bahwa pendekatan diplomasi Indonesia yang berbasis Pancasila memiliki daya tarik tersendiri bagi negara-negara berkembang. Diplomasi ini tidak hanya mengutamakan kepentingan nasional, tetapi juga berfokus pada kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Wahyudi berpendapat bahwa Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengimplementasikan nilai-nilai lokal dan budaya nasional dalam diplomasi internasional. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung

dalam Pancasila memiliki daya tarik moral yang kuat, yang mampu memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian konflik-konflik internasional.

Dalam konteks internasional, Indonesia telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai upaya mediasi. Misalnya, dalam konflik Palestina, Indonesia secara konsisten mendukung hak-hak rakyat Palestina dan mendorong penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi. Menurut Affandi (2022: 45), sikap ini sejalan dengan nilai universal kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung etika global.

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia tetap konsisten mempertahankan pendekatan diplomasi berbasis nilai. Sebagai negara yang menganut prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia mengedepankan pentingnya persatuan, keadilan, dan kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik global. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan kepentingan politik atau ekonomi semata, tetapi juga menempatkan nilai-nilai universal sebagai landasan utama dalam setiap tindakan diplomatik Indonesia.

Indonesia juga telah berperan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan telah menggunakan posisinya untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina melalui jalur damai. Dalam krisis Rohingya, Indonesia menunjukkan langkah konkret dengan memberikan bantuan kemanusiaan serta mengedepankan diplomasi regional melalui ASEAN. Menurut Hidayat (2023), diplomasi Indonesia dalam krisis Rohingya mencerminkan semangat musyawarah dan prinsip keadilan sosial, yang menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik ini. Indonesia tidak hanya fokus pada bantuan kemanusiaan, tetapi juga berusaha menciptakan mekanisme dialog antarnegara untuk menyelesaikan akar masalah yang ada. Hidayat (2023: 78) mencatat bahwa pendekatan Indonesia dalam isu Rohingya menekankan pentingnya keadilan regional berbasis nilai-nilai musyawarah dan kemanusiaan, dua unsur inti dari Pancasila yang mulai diadopsi oleh beberapa negara ASEAN.

Dalam menjalankan peran sebagai mediator dan fasilitator, Indonesia telah menggunakan berbagai strategi dan pendekatan, termasuk:

- a. Dialog dan diplomasi: Indonesia telah menggunakan dialog dan diplomasi sebagai alat untuk mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai.
- b. Bantuan kemanusiaan: Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik dan telah bekerjasama dengan organisasi internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang lebih efektif.

- c. Fasilitasi dan mediasi: Indonesia telah berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik internasional dan telah bekerjasama dengan negara-negara lain untuk mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai.

Dalam konteks internasional, diplomasi Indonesia dikenal dengan pendekatan lunak atau soft diplomacy, yang tidak bersandar pada tekanan militer maupun kekuasaan ekonomi, melainkan pada nilai-nilai etis dan kemanusiaan. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai landasan yang cocok dan kuat dalam pendekatan tersebut. Menurut Ma'ruf dan Wahyuni (2021: 47), diplomasi Indonesia dinilai sebagai value-based diplomacy yang konsisten mengedepankan etika keadilan dan musyawarah sebagai alternatif dari dominasi kekuatan besar yang cenderung hegemonik.

Dalam konflik Palestina, Indonesia secara konsisten menunjukkan sikap mendukung kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Palestina. Indonesia memainkan peran yang sangat aktif sebagai mediator yang mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Selama beberapa dekade, Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan. Pendekatan ini sangat konsisten dengan sila kedua Pancasila yang menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain itu, Indonesia juga mendorong dialog dan musyawarah antara Palestina dan Israel sebagai solusi damai yang lebih bertahan lama. Pendekatan ini tidak semata-mata bersifat politis, tetapi berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Diplomasi Indonesia menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan, sebagaimana semangat Pembukaan UUD 1945. Hanifah dan Adnan (2023: 34) menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil memosisikan diri sebagai “wakil moral” dari negara-negara berkembang yang menolak standar ganda dalam isu hak asasi manusia, khususnya di tengah ketidakadilan yang dialami Palestina.

Dalam krisis kemanusiaan Rohingya, Indonesia mengedepankan strategi multijalur, meliputi bantuan kemanusiaan, diplomasi bilateral, serta dorongan kepada ASEAN untuk lebih responsif. Pendekatan ini mencerminkan sila-sila Pancasila seperti persatuan, musyawarah, dan kemanusiaan. Lestari (2023: 102) menegaskan bahwa diplomasi Indonesia dalam isu ini mencerminkan model diplomasi berbasis nilai yang mengutamakan empati dan solidaritas regional, bukan sekadar kepentingan politik. Bahkan laporan resmi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR, 2022) mengakui bahwa Indonesia memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali agenda perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara.

Adapun dalam menghadapi ketegangan di Laut Cina Selatan, Indonesia memegang prinsip netralitas aktif, berlandaskan pada sila persatuan dan semangat musyawarah. Meskipun tidak terlibat dalam klaim teritorial secara langsung, Indonesia tetap memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan dan kebebasan navigasi. Wahyudi (2021: 41) mencatat bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan non-konfrontatif yang menekankan dialog dan keseimbangan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menolak dominasi dan mengedepankan keadilan kolektif antarbangsa.

Implementasi Pancasila dalam Diplomasi.

Nilai-nilai Pancasila telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam misi perdamaian dan diplomasi internasional. Indonesia percaya bahwa dialog dan kerjasama multilateral merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai tantangan geopolitik dan ekonomi global. Dalam berbagai forum internasional seperti G20, PBB, dan ASEAN, Indonesia terus mengedepankan pentingnya musyawarah dan mufakat untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan semangat Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Prinsip musyawarah dan mufakat digunakan dalam berbagai forum internasional seperti ASEAN, G20, hingga PBB. Diplomasi Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional sempit, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global. Hal ini terlihat dalam berbagai posisi diplomatik Indonesia yang mengedepankan penyelesaian damai, dialog multilateral, dan solusi inklusif dalam isu-isu internasional seperti Palestina dan Myanmar.

Dalam menghadapi isu perdagangan global dan ketegangan geopolitik, Indonesia cenderung memilih jalur diplomasi dialogis yang menekankan pentingnya keseimbangan dan kesetaraan antarbangsa. Pendekatan ini sesuai dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila. Menurut Prasetya dan Widiyanto (2021: 88), Indonesia cenderung tampil sebagai kekuatan moral dalam forum internasional, menawarkan pendekatan diplomatik berbasis prinsip dan nilai, bukan kekuatan ekonomi atau militer.

Salah satu bentuk nyata implementasi nilai Pancasila dalam diplomasi adalah keterlibatan aktif Indonesia dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian (peacekeepers) ke berbagai wilayah konflik seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan Selatan. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam

menerjemahkan nilai perdamaian abadi dan kemanusiaan ke dalam tindakan nyata di tingkat global. Dalam laporan UN Peacekeeping (2022), Indonesia termasuk dalam 10 besar negara pengirim pasukan terbanyak dari kawasan Asia Tenggara, dengan pendekatan yang mengedepankan prinsip netralitas dan penguatan kapasitas lokal.

Selain itu, pendekatan diplomatik Indonesia juga mencerminkan semangat musyawarah dan kerakyatan yang menjadi ciri khas Pancasila. Dalam forum seperti Bali Democracy Forum dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Indonesia mendorong penguatan demokrasi dan perlindungan HAM melalui dialog, bukan tekanan koersif. Sari dan Darmawan (2023: 117) menyebut bahwa kontribusi diplomatik Indonesia dalam forum-forum ini mengedepankan pendekatan deliberatif yang tidak memaksakan kehendak, melainkan membangun konsensus melalui nilai bersama.

Selain itu, Indonesia juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan dalam berbagai krisis internasional, mulai dari konflik di Timur Tengah hingga bencana alam di Asia dan Afrika. Bantuan ini tidak hanya berupa materi, tetapi juga mencakup upaya diplomatik untuk membangun kembali hubungan antarnegara yang rusak akibat konflik. Melalui pendekatan ini, Indonesia berusaha untuk mempromosikan perdamaian dunia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam diplomasi Indonesia bukan sekadar jargon normatif, tetapi telah menjadi paradigma yang hidup dan relevan dalam menghadapi tantangan global. Pendekatan diplomasi yang berbasis pada nilai ini menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pemimpin etis yang mampu menawarkan alternatif jalan tengah di tengah polarisasi dunia.

Pandangan Tokoh Mengenai Mancasila dalam Resolusi Konflik.

Menurut Wahyuni (2022: 88), Pancasila bukan sekadar ideologi negara, melainkan dapat berfungsi sebagai paradigma etik global yang memiliki kekuatan moral dalam menyelesaikan konflik antarbangsa. Ia menekankan bahwa prinsip keadilan sosial, musyawarah, dan kemanusiaan dalam Pancasila adalah fondasi yang sangat strategis dalam diplomasi negara-negara berkembang, khususnya ketika menghadapi tekanan dari kekuatan besar dunia. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya relevan dalam politik domestik, tetapi juga mampu ditawarkan sebagai model alternatif dalam penyelesaian konflik global yang lebih manusiawi dan setara.

Menurut penelitian oleh Rahman (2023), globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan dalam politik internasional, dengan negara-negara besar mendominasi sistem

global melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berfokus pada kepentingan ekonomi dan kekuatan militer. Namun, Rahman juga mencatat bahwa meskipun begitu, Indonesia berhasil memanfaatkan posisi geografis dan hubungan internasional yang terjalin dengan negara-negara di Asia Tenggara dan kawasan global untuk mempromosikan diplomasi berbasis nilai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan geopolitik yang besar, Indonesia tetap bisa memainkan peran strategis dalam membawa prinsip-prinsip Pancasila ke dalam diplomasi internasional.

Sejalan dengan itu, Anwar (2023: 41) berpendapat bahwa Pancasila mampu menjadi “normative force” dalam politik luar negeri Indonesia, karena nilai-nilainya tidak bersifat dominatif, melainkan kooperatif dan deliberatif. Ia menyatakan bahwa keberhasilan diplomasi Indonesia dalam konflik-konflik internasional bukan hanya karena posisi geografis atau politik, melainkan karena pendekatan nilai yang mengutamakan dialog, empati, dan penyelesaian damai.

4. KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terbukti tidak hanya memiliki relevansi dalam kehidupan nasional, tetapi juga memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik global. Melalui pendekatan diplomasi berbasis nilai, Indonesia mampu memainkan peran strategis dalam berbagai konflik internasional, seperti konflik Palestina, krisis Rohingya, dan ketegangan di Laut Cina Selatan.

Setiap sila dalam Pancasila memberikan fondasi etis yang kokoh bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah menjadi prinsip operasional dalam setiap langkah diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional. Indonesia secara konsisten menawarkan pendekatan yang menolak kekerasan dan mengedepankan dialog, kerjasama, dan empati sebagai jalan keluar dari konflik.

Pendapat para akademisi kontemporer menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia berbasis Pancasila telah berkembang menjadi kekuatan normatif yang diperhitungkan secara global. Pandangan seperti yang disampaikan oleh Wahyuni (2022) dan Anwar (2023) menegaskan bahwa pendekatan Indonesia layak dijadikan model oleh negara-negara berkembang lain dalam merespons tantangan global tanpa harus tunduk pada dominasi kekuatan besar.

Pancasila bukan hanya relevan dalam politik domestik, tetapi juga mampu diterapkan dalam penyelesaian konflik global. Diplomasi berbasis nilai Pancasila memberi

kontribusi positif terhadap penyelesaian konflik dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam diplomasi dan mediasi konflik dapat menjadi kontribusi penting Indonesia dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan beradab. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, tetapi juga menunjukkan bahwa diplomasi berbasis nilai memiliki daya tawar yang nyata di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. (2022). *Pancasila: Eksistensi dan aktualisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). (2022). *Annual report: Regional humanitarian challenges*. ASEAN Secretariat.
- BoAnwar, D. F. (2023). Pancasila sebagai kekuatan normatif diplomasi global Indonesia. *Jurnal Strategi Global*, 8(1), 37–52.
- Hanifah, L., & Adnan, A. (2023). Indonesia's moral diplomacy in the Palestine-Israel conflict. *Indonesian Journal of International Studies*, 5(2), 22–39.
- Harahap, M. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayat, R. (2023). *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juntami, A. P. (2023). Pancasila and peace: Peran Indonesia dalam mediasi konflik Israel-Palestina; Implementasi Pancasila pada diplomasi perdamaian dunia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*.
- Kristina, D. (2021). *Metode penelitian kualitatif: Pendekatan deskriptif dan studi kasus*. Yogyakarta: Widina Bhakti Persada.
- Latief, Y. (2022). *Wawasan Pancasila*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ma'ruf, S., & Wahyuni, I. (2021). Diplomasi nilai dan politik luar negeri Indonesia. *Jurnal Global Strategis*, 15(1), 45–58.
- Nasoha, A. M. M. (2024). *Harmonisasi hukum Islam dan Pancasila dalam menangani kasus terorisme di Indonesia*. ResearchGate.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Konflik hukum dalam tata negara Indonesia terkait penarikan kewarganegaraan: Perspektif konstitusional. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*.

- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., & Anasti, T. (2025). Pancasila sebagai landasan etis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(1), 32–48.
- Nasoha, A. M. M., et al. (2024). Analisis kritis penerapan Pancasila dalam pengembangan hukum internasional: Perspektif negara berkembang. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(2), 1–11.
- Notonegoro. (2020). *Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Permana, A. A. (2021). *Retno Marsudi: Diplomat perempuan pertama dengan segudang prestasi*. ResearchGate.
- Prasetya, H., & Widiyanto, R. (2021). Nilai Pancasila dan diplomasi Indonesia di era multipolar. *Jurnal Hubungan Internasional Nusantara*, 6(2), 85–93.
- Prayitno, G. (2024). Prinsip keadilan berlandaskan Pancasila dalam penyelesaian sengketa pertambangan di luar persidangan. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 150–165.
- Prayuda, R. (2019). Diplomasi dan power: Sebuah kajian analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(1), 45–60.
- Saputra, A. (2021). *Pancasila dalam perspektif globalisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sari, D., & Darmawan, A. (2023). Musyawarah dan diplomasi nilai: Peran Indonesia di Forum Demokrasi Asia. *Jurnal Politik Global*, 5(1), 110–125.
- Sumarto, S. (2019). *Pancasila dan NKRI*. Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- UN Peacekeeping. (2022). *Indonesia's contribution to peace missions*. United Nations Department of Peace Operations.
- Wahyudi, A. (2021). Neutrality with principle: Indonesia's role in South China Sea disputes. *Journal of ASEAN Foreign Affairs*, 4(1), 30–47.
- Wahyuni, S. (2022). *Diplomasi emansipatoris: Jalan ketiga diplomasi negara berkembang*. Yogyakarta: Penerbit Genta.
- Wibowo, Y. (2022). Value-oriented diplomacy: Tantangan dan peluang Indonesia dalam geopolitik Asia. *Jurnal Hubungan Internasional Kontemporer*, 6(1), 98–112.